

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002) Sektor publik dari sudut pandang ilmu ekonomi adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai sesuatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Indikator dari siklus akuntansi keuangan sektor publik.

Sektor publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomiyang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba). Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dana kuntansi pada wilayah publik.

(Gerung et al., 2020) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik adalah

mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut (Jamaluddin & Deviyanti, 2016) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Dari definisi diatas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagaisuatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna mengambil keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah (*goverment*), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

2.1.2 Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Bastian, 2019) elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen berikut ini :

1. Perencanaan publik

Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut

tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.

2. Penganggaran publik

Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

3. Realisasi anggaran publik

Realisasi terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan dan pelaksanaan program. Sedangkan siklusnya dimulai dengan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian.

4. Pengadaan barang dan jasa publik

Proses cara serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.

5. Pelaporan keuangan sektor publik

Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja, program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

6. Audit sektor publik

Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan serti tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, dan

mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

7. Pertanggung jawaban publik

Proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemberi amanahnya. Contoh: penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ketua Yayasan kepada Dewan Penyantunnya.

2.1.3 Siklus akuntansi keuangan sektor publik

Menurut Bastian (dalam Yulitiawati, 2024) siklus akuntansi keuangan sektor publik sebagai berikut:

- a. Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain;
- b. Analisis bukti transaksi;
- c. Mencatat data transaksi;
- d. Mengikhtisarkan;
- e. Laporan

2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas

keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Dewi & Mildawati, 2018). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Andriyani, 2016)

Menurut (Wijaya et al., 2017) laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik. Pertanggung jawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Fikrian, 2017). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

2.2.1 Indikator Akseibilitas Laporan Keuangan

Menurut (Superdi, 2015) terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan:

- a. Terbuka di media masa
- b. Mudah diakses

c. Ketersediaan informasi

2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Menurut (Dunn et al., 2011) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggung jawabkan, mengapa pertanggung jawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggung jawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa *eterpreneurship* (kewirausahaan) pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.

Menurut (Novitasari & Harsasto, 2019) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka dari pada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Maulana & Lubis, 2020).

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggung jawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.3.1 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut (Asiva, 2015) ada 5 indikator dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yaitu:

1. Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku
2. Pertanggung Jawaban Kepada Public
3. Terbuka, Cepat Dan Tepat.
4. Penyusunan APBD
5. Memonitor Kinerja Dan Mengvaluasi Manajemen

2.4 Penggunaan Informasi Keuangan

Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan daerah. Menurut (Ibrahim, 2017) bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

Secara rinci tujuannya yaitu :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi

aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dana lokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan organisasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Namun kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah dapat diringkas sebagai berikut (Oktasari et al., 2021).

1. Masyarakat pengguna pelayanan public membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui

keberadaan penggunaan yang diberikan.

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, dan mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajemen internal pemda terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan.

2.5 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan ini dibuat untuk menyajikan laporan keuangan yang bertujuan agar penjelasan laporan keuangan lebih terperinci dan lebih detail saat dibaca. Dengan menyusun laporan atas laporan keuangan tentunya akan memudahkan pembaca mengetahui informasi penting dalam laporan keuangan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi

bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Suryono et al., 2020).

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut (Yuliani, 2017), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang - kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas untuk paramanager (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
3. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas

informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

4. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
5. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Zam, 2023)

2.6 Hubungan Aksesibilitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggung jawaban manapun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio dan website serta forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apabila artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik.

Menurut Putri (2017) aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penerapan penting dalam akuntansi keuangan daerah yang dilakukan pemerintah. Melalui aksesibilitas laporan keuangan masyarakat akan mudah untuk memperoleh informasi. Aksesibilitas laporan keuangan menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sederhananya, aksesibilitas laporan

keuangan melekat dan sangat penting bagi masyarakat sebagai sumber informasi untuk mengetahui pertanggung jawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan. Untuk itu semakin baik aksesibilitas laporan keuangan yang disajikan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Fauziyah & Handayani (2017) dan Putri (2017) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Defana & Rahayu (2023) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan secara simultan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan. Mulyanto et al., (2020) menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Indria (2018) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Fien, Naz`aina dan Muammar (2023) menunjukkan bahwa aksesibilitas pengelolaan keuangan tidak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

b. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor public dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, No.Tahun	Variabel yang diteliti, alat analisis, hasil penelitian	F
1	Indrie Avisha & Budiman Slamet	Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor) Jurnal Akutansi Pratama.Volume (1) Tahun 2024	Variabel: Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Alat analisis: Regresi Linear Sederhana Hasil analisis: Hasil penelitian menunjukan Hasil uji hipotesa secara parsial menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan daerah Kabupaten Bogor dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor. Hasil uji hipotesa secara simultan yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor.	•Alat Anal Linear •Vari Peny Akse Lapo dan Akun Peng
2	Sumarni & Sylvia Sjarlis	Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan	Variabel: Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alat Analisis: Regresi Linear Sederhana Hasil Analisis:	• Ala Ana Lin • Var Akse Lap • Var

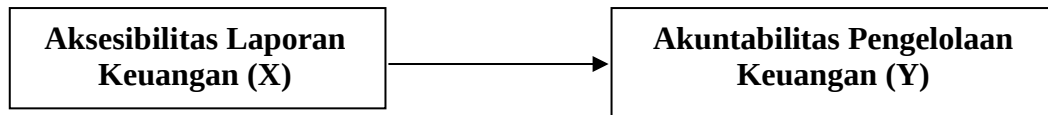
		Internal Control Sebagai Variabel Moderating Pada Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Jurnal Cendekia Akademika Indonesia Volume 2 (2) Tahun 2023	Secara teoritis Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam pencegah <i>fraud</i> baik secara parsial maupun secara bersama– sama.	Kua Keu • Var Aku Pen Keu
3	Nining Asniar Ridzal	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. Jurnal Akutansi. Volume 6 (1) Tahun 2020	Variabel: Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Alat Analisis: Regresi Linear Sederhana Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.	• Ala Ana Lin • Var Kua Keu • Var Aku Kin
4	Fernanda Alivia Defana & Sri Rahayu	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021) Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 11 (1) Tahun 2023	Variabel: Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Alat analisis: Regresi Linear Sederhana Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap	• Ala Ana Lin • Var Kua Keu Sist Pen Inte Aks Lap Keu • Var Aku Pen Keu

			akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	
5	Hutahaeen & Hamdani Parsaoran	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 11 (1) Tahun 2021	Variabel: Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Laporan Keuangan. Alat analisis: Regresi Linear Sederhana Hasil Penelitian: secara parsial variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah kota Medan. Secara simultan variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah kota Medan.	• Al - An - Lin • Var - Per - Keu (X1 - Lap - Keu (X2 - Akt - Per - Keu (X3 • Var - Tra - Lap - Keu

C. Kerangka Pemikiran

Menurut (Sinaga, 2023 : 9) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Akseibilitas Laporan Keuangan (X) sebagai

variabel bebas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y) sebagai variabel terikat. Gambaran kerangka pemikiran ini dapat lebih jelas dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Menurut (Khomsin, 2008) hipotesis di identifikasikan sebagai persyaratan yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang di ajukan dalam penelitian. Hipotesis adalah sebuah jawaban sementara, masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: diduga ada Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.